

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak awal tahun 1996 sampai dengan puncaknya tahun 1997 (Karya Satya, 2008), sehingga membuka wacana dan gerakan baru diseluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia pemerintahan. Semangat yang menyala untuk melakukan reformasi, semakin cenderung melahirkan euphoria, memberikan energi yang luar biasa bagi bangkitnya wacana otonomi daerah (Sri Budi Santoso, 2000).

Keuangan daerah di masa prareformasi, walaupun sudah menyinggung otonomi daerah, namun masih memberikan wewenang yang terbatas kepada Pemerintah Daerah sebagai kekuatan eksekutif. Hal ini tampak dalam definisi PEMDA yang meliputi Kepala Daerah dan DPRD. Sedangkan di masa pasca reformasi, wewenang yang diberikan pada Pemerintah Daerah telah terlihat secara nyata melalui definisi PEMDA yang hanya meliputi Kepala Daerah serta perangkat daerah lainnya (Halim, 2001 : 7).

Pemerintahan di masa prareformasi mengalami ketergantungan fiskal dan subsidi dari Pemerintah Pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Belanja Daerah. Pemerintah Daerah kurang diberi keleluasaan dalam menentukan kebijakan daerahnya sendiri. Kewenangan yang diberikan kepada daerah tidak diimbangi dengan pemberian infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang profesional, serta pembiayaan yang adil. Hal ini mengakibatkan tidak terjadi kemandirian Daerah, namun malah

terjadi ketergantungan Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Akibatnya Pemerintah Daerah tidak responsif dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakat daerah (www.ekonomirakyat.org).

Pemerintahan di masa reformasi telah merubah paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara adil dan berimbang. Wujudnya melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Halim, 2001 : 3).

Pertimbangan penyelenggaraan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi dalam negeri menunjukkan bahwa rakyat menginginkan keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Sedangkan keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut persaingan antar negara (Halim, 2001 : 2).

Desentralisasi mengakibatkan munculnya otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Munculnya daerah otonom tersebut akan berdampak positif pada daerah tersebut, yaitu memberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau mungkin dalam pengambilan keputusan yang terbaik untuk masyarakatnya. Sehingga nantinya dapat melahirkan masyarakat yang inovatif, kreatif, dan mandiri dan dapat memajukan pembangunan nasional tanpa menggantungkan diri dari pemerintah pusat.

Otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik untuk mendorong pembangunan daerah, menggantikan sistem sentralisasi kewenangan yang

dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunan di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah. Daerah dituntut untuk menggali sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan bantuan dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai prioritas dan aspirasi masyarakat (www.ekonomirakyat.org).

Keberhasilan pengembangan otonomi daerah dapat dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan APBD nya yang semakin meningkat. Harapan di masa yang akan datang ketergantungan Daerah terhadap Pusat dapat diminimalkan untuk menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan (Noni, 2009).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti tentang **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Lamongan”** dengan merujuk pada penelitian sebelumnya dengan mengembangkan tolak ukur kinerja keuangan.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan suatu masalah mengenai :

“Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah di Kabupaten Lamongan ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar latar belakang masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh masukan pemikiran dengan manfaat yang ingin dicapai sebagai berikut:

a. Bagi Instansi Pemerintahan

Menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.

b. Bagi Penulis

Sebagai bahan atau ilmu baru untuk menambah wawasan dalam memahami perkembangan kinerja keuangan daerah.

c. Bagi Peneliti Berikut

Sebagai bahan pertimbangan referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian tentang kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.

d. Bagi STIE Perbanas

Untuk menambah koleksi perpustakaan sehingga semakin lengkap dan dapat di gunakan sebagai referensi peneliti berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka pembahasan akan disusun dalam 5 bab yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, seperti teori-teori tentang otonomi daerah, kinerja keuangan, desentralisasi fiskal, pengelolaan keuangan daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang gambaran kinerja keuangan sebelum dan sesudah otonomi beserta hasil analisis data dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil analisis beserta saran dari penulis untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.